



PEMERINTAH
KOTA PEKALONGAN

2025-2029



RENCANA STRATEGIS

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PEKALONGAN



dinkominfo.pekalongankota.go.id



diskominfo@gafe.pekalongankota.go.id



(0285) 421243 / 420223 fax (0285) 421243



Jl. Majapahit Nomor 5 Kota Pekalongan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029.

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan untuk periode lima tahun ke depan. Renstra ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2025-2029, serta memperhatikan perkembangan dan tantangan yang dihadapi di bidang komunikasi dan informatika.

Kami menyadari bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berlangsung sangat pesat. Hal ini menuntut Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan untuk terus berinovasi dan beradaptasi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Renstra ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kami berkomitmen untuk melaksanakan Renstra ini dengan sebaik-baiknya demi mewujudkan Kota Pekalongan yang lebih maju, modern, dan berdaya saing.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra ini. Semoga Renstra ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Pekalongan.

Pekalongan, 19 September 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Pekalongan



ARIF KARYADI, S.Sos

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
PERANGKAT DAERAH	1
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	1
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	2
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	10
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.1.5 Kelompok sasaran layanan	20
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	22
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	22
2.2.2 Isu Strategis	25
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	32
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029	32
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029	33
3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	35
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.....	36
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	37
4.1 Uraian Program.....	37
4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan.....	39

4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	50
4.4 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Utama Pembangunan	54
4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	55
4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	56
BAB V PENUTUP.....	58

DAFTAR TABEL

Tabel II-1 Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan	10
Tabel II-2 Komposisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Berdasarkan Golongan	11
Tabel II-3 Prasarana dan Sarana Dinkominfo Kota Pekalongan Tahun 2025	12
Tabel II-4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan	14
Tabel II-5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan	17
Tabel II-6 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	22
Tabel II-7 Isu Strategis Perangkat Daerah.....	26
Tabel III-1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD	34
Tabel III-2 Strategi Renstra PD.....	35
Tabel III-3 Arah Kebijakan Renstra PD	36
Tabel IV-1 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan.....	39
Tabel IV-2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	50
Tabel IV-3 Indikator Utama Pembangunan	54
Tabel IV-4 Indikator Kinerja Utama PD	55
Tabel IV-5 Indikator Kinerja Kunci	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan ..4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat dalam beberapa tahun terakhir telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam hal pelayanan publik. Teknologi informasi kini tidak hanya menjadi alat bantu, tetapi telah menjadi bagian integral dari sistem pemerintahan yang modern. Dalam konteks ini, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) memiliki peran kunci dalam mendukung penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan, yang berujung pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, tren global yang mengarah pada keterbukaan informasi publik memerlukan upaya yang lebih intensif dalam memastikan bahwa informasi yang dikelola oleh pemerintah dapat diakses dengan mudah oleh publik. Keterbukaan informasi publik ini penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, penting bagi Diskominfo untuk mengembangkan sistem dan platform yang mendukung prinsip-prinsip keterbukaan ini, sehingga masyarakat dapat mendapatkan informasi yang cepat dan akurat.

Dalam hal ini, keamanan informasi menjadi isu yang tak kalah penting. Dengan semakin berkembangnya ancaman terhadap dunia maya, seperti serangan siber yang semakin canggih, Diskominfo dituntut untuk menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi yang dikelola oleh pemerintah. Upaya penguatan sistem keamanan informasi menjadi prioritas agar data dan informasi yang dimiliki tetap terlindungi, serta dapat diakses dengan aman oleh masyarakat.

Selain itu, pemanfaatan data statistik sektoral yang semakin berkembang juga membuka peluang baru dalam pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Data yang akurat dan relevan menjadi dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi kinerja pemerintah. Oleh karena itu, Diskominfo perlu terus memperkuat kapasitas dalam pengelolaan dan pemanfaatan data statistik sektoral, agar dapat menghasilkan kebijakan yang berbasis data dan lebih responsif terhadap kebutuhan

masyarakat.

Namun, seiring dengan kemajuan teknologi, tantangan dalam melaksanakan pelayanan publik digital semakin kompleks. Pemerintah dihadapkan pada kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas infrastruktur teknologi informasi, mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten, serta mengatasi kendala dalam adopsi teknologi di daerah-daerah dengan akses terbatas. Oleh karena itu, dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap berbagai perkembangan dan tantangan tersebut, serta merumuskan langkah-langkah yang tepat untuk mencapainya.

Dengan latar belakang ini, penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam mendukung penerapan teknologi informasi yang efisien, aman, dan transparan, serta memastikan pelayanan publik digital yang dapat memenuhi harapan masyarakat di masa depan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinkominfo adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Kota Besar dan Kota- Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 698);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

- Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2024 – 2026;
 13. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 1);
 14. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029;
 15. Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pekalongan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra

Maksud

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 bertujuan untuk menyediakan arah dan pedoman yang jelas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam lima tahun mendatang. Renstra ini disusun berdasarkan perkembangan teknologi informasi, kebutuhan pelayanan publik digital, serta tantangan dalam keterbukaan informasi publik dan pengelolaan keamanan data. Dokumen ini juga berfungsi sebagai landasan bagi seluruh kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Diskominfo, guna mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, efisien, serta aman.

Tujuan

Renstra disusun dengan tujuan:

1. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Pekalongan sebagai penjabaran visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih;
2. Menerjemahkan visi dan misi Walikota ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan dengan berpedoman kepada RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029;
3. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

pada bab ini akan berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

1. Sub Bab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah akan berisi :

- a. Tugas fungsi dan struktur Perangkat Daerah;
- b. Sumber daya Perangkat Daerah;
- c. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
- d. Kelompok sasaran layanan

2. Sub Bab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah akan berisi:

- a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan
- b. Isu Strategis.

BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan akan berisi :

1. Tujuan Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
2. Sasaran Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2025;

3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029;
4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; dan
5. penentuan isu-isu strategis.

BAB IV : Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kegiatan Penyelenggaraan Bidang Urusan akan berisi :

1. Uraian Program;
2. Uraian Kegiatan;
3. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah;
4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah;
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V : Penutup

Bab ini memuat diantaranya Kesimpulan penting substantial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pekalongan merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan berbasis teknologi informasi. Tugas utama Diskominfo adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian yang menjadi kewenangan daerah, serta tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Diskominfo Kota Pekalongan menyediakan berbagai layanan publik, di antaranya pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), pengembangan infrastruktur dan layanan teknologi informasi, pengelolaan data dan statistik sektoral, layanan informasi publik, penguatan literasi digital masyarakat, serta pengamanan informasi dan komunikasi melalui sistem persandian.

Sumber daya yang mendukung pelaksanaan tugas tersebut meliputi sumber daya manusia (SDM) yang terdiri dari aparatur berkompeten di bidang TIK, anggaran yang bersumber dari APBD, serta dukungan infrastruktur teknologi informasi seperti jaringan fiber optic, pusat data, command center, dan aplikasi layanan publik. Kolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya, mitra swasta, serta komunitas digital juga menjadi kekuatan penting dalam mengembangkan layanan yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan

masyarakat.

Pada periode Renstra sebelumnya, Diskominfo Kota Pekalongan berhasil mencapai sejumlah capaian penting, antara lain peningkatan indeks SPBE, perluasan jaringan internet publik (WiFi publik), serta peningkatan kualitas pelayanan informasi publik yang dibuktikan dengan penghargaan dalam keterbukaan informasi. Selain itu, program literasi digital untuk masyarakat dan pelatihan teknologi informasi bagi ASN juga telah menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan kapasitas digital di lingkungan pemerintahan dan masyarakat.

Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah hambatan yang dihadapi, seperti keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur TIK, kesenjangan literasi digital antar kelompok masyarakat, serta tantangan dalam integrasi sistem informasi antar perangkat daerah. Untuk itu, Renstra Diskominfo Kota Pekalongan periode ini disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk memperkuat infrastruktur digital, meningkatkan kapasitas SDM, dan mendorong integrasi layanan berbasis data guna mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka, efisien, dan berbasis teknologi.

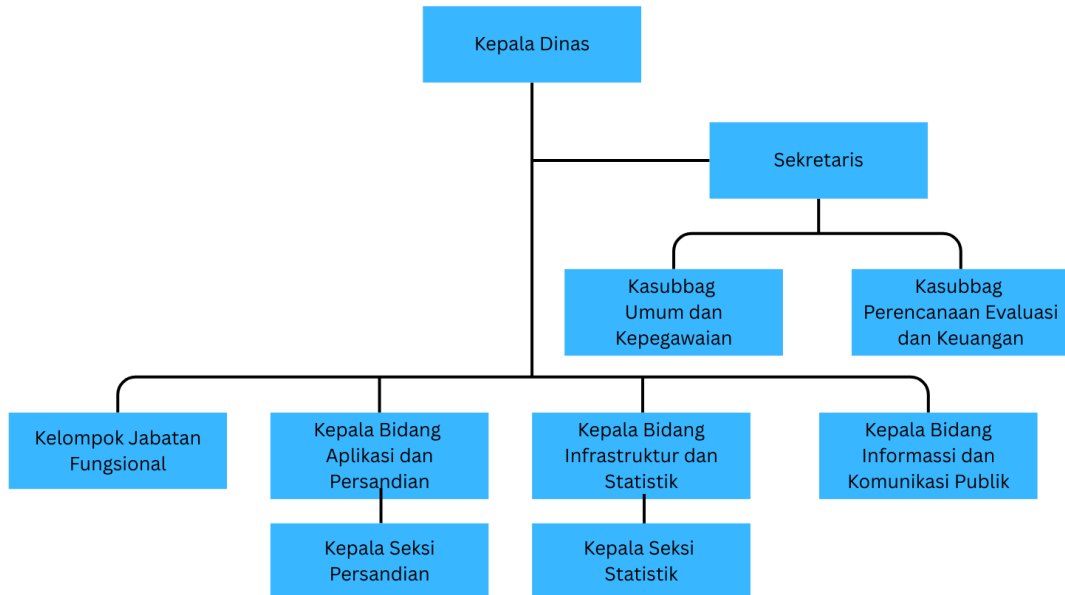
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016. Kemudian dalam rangka pembentukan struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah dikeluarkan Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pekalongan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pekalongan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah serta mempunyai fungsi:

- 1) perumusan dan penetapan sasaran, program bidang komunikasi dan informatika;
- 2) perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika;
- 3) pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang informasi dan komunikasi publik;
- 4) pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang infrastruktur dan statistik;
- 5) pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang aplikasi dan persandian;
- 6) pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
- 7) penyelenggaraan Pejabat Pemerintah Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi / Government Chief Information Officer (GCIO) Daerah;
- 8) pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP);
- 9) pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
- 10) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan terdiri dari Kepala Dinkominfo yang memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, dan membawahi Sekretariat, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang infrastruktur dan Statistik, Bidang Aplikasi dan Persandian serta Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan struktur organisasi Dinkominfo Kota Pekalongan dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan

Sebagaimana Gambar 2.1, masing-masing unsur dari organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Sekretariat

Tugas :

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, pengoordinasian rencana program, kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja serta administrasi keuangan.

Fungsi:

- 1) Perumusan sasaran, program dan kegiatan dinas;
- 2) Pengkoordinasian penyusunan kebijakan dinas;
- 3) Pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang-bidang;
- 4) Pengkoordinasian penyusunan laporan dan evaluasi capaian kinerja, sasaran, program dan kegiatan;
- 5) Pembinaan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
- 6) Pengkoordinasian pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan bidang

keuangan;

- 7) Pengkoordinasian pengelolaan data dan informasi;
- 8) Pengkoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 9) pengkoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);
- 10) Pengkoordinasian pelaporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB);
- 11) Pengendalian, pembinaan, [engevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan ; dan
- 12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya.

b. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan

Tugas

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Fungsi

- 1) menyusun rencana kerja di bidang perencanaan, evaluasi dan keuangan;
- 2) menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- 3) menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi evaluasi capaian program, kegiatan dan anggaran
- 4) menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi pelaporan capaian kinerja;
- 5) melaksanakan verifikasi pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan;
- 6) melaksanakan fungsi akuntansi;
- 7) menyusun bahan dan pengoordinasian laporan keuangan;
- 8) menyusun bahan profil perangkat daerah;
- 9) melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
- 10) menyusun bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 11) menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP); dan
- 12) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

c. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Tugas

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Fungsi

- 1) menyusun rencana kerja di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- 2) melaksanakan dan mengelola kegiatan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
- 3) melaksanakan kegiatan tata kelola barang milik daerah meliputi pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, penghapusan dan pelaporan barang milik daerah;
- 4) melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembinaan kepegawaian;
- 5) menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP);
- 6) mengelola dan menyusun laporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB); dan
- 7) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

d. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Tugas

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang informasi dan komunikasi publik.

Fungsi

- 1) perumusan program kerja sesuai bidang informasi dan komunikasi publik;
- 2) perumusan bahan kebijakan bidang informasi dan komunikasi publik;
- 3) pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang informasi dan komunikasi publik;
- 4) penyelenggaraan monitoring opini dan aspirasi publik;
- 5) penyelenggaraan monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah;

- 6) pengelolaan konten dan perencanaan Media Komunikasi Publik;
- 7) pengelolaan Media Komunikasi Publik milik Pemerintah Daerah;
- 8) penyelenggaraan pelayanan Informasi Publik;
- 9) penyelenggaraan layanan hubungan media;
- 10) penyelenggaraan kemitraan dengan pemangku kepentingan;
- 11) penyelenggaraan manajemen komunikasi krisis;
- 12) penyelenggaraan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
- 13) penyelenggaraan dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola komisi informasi di daerah;
- 14) penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas;
- 15) penyelenggaraan penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik;
- 16) perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) sesuai bidang tugasnya;
- 17) pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- 18) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

e. Bidang Infrastruktur dan Statistik

Tugas

Bidang Infrastruktur dan Statistik mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang infrastruktur dan penyelenggaraan statistik sektoral.

Fungsi

- 1) perumusan program kerja bidang infrastruktur dan statistik;
- 2) perumusan bahan kebijakan bidang infrastruktur dan statistik;
- 3) pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang infrastruktur dan statistik;
- 4) pengoordinasian pendaftaran dan penggunaan nama domain Pemerintah Daerah;
- 5) penyelenggaraan pengelolaan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 6) pengoordinasian penyelenggaraan Pusat Data/Data Center dan Pusat Pemulihan Bencana/ Disaster Recovery Center (DRC) Pemerintah

Daerah;

- 7) pengoordinasian penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
- 8) pengoordinasian penyelenggaraan Jaringan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah;
- 9) pengoordinasian penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah;
- 10) pengoordinasian pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah;
- 11) pengoordinasian penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah;
- 12) perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- 13) pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- 14) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

f. Seksi Statistik

Tugas

- 1) menyusun rencana kegiatan bidang statistik;
- 2) menyusun bahan kebijakan bidang statistik;
- 3) menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang statistik;
- 4) menyusun bahan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral;
- 5) melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi;
- 6) melaksanakan pembangunan metadata statistik sektoral;
- 7) melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral;
- 8) melaksanakan pengembangan infrastruktur statistik sektoral;
- 9) melaksanakan otorisasi statistik sektoral di Daerah;
- 10) melaksanakan kerjasama publikasi data statistik;
- 11) menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- 12) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan;

g. Bidang Aplikasi dan Persandian

Tugas

Bidang Aplikasi dan Persandian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang aplikasi dan persandian.

Fungsi

- 1) perumusan program kerja bidang aplikasi dan persandian;
- 2) perumusan bahan kebijakan bidang aplikasi dan persandian;
- 3) pengoordinasian pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan aplikasi dan proses bisnis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 4) pengoordinasian pendaftaran Sistem Elektronik Pemerintah Daerah;
- 5) pengoordinasian pengelolaan data, dokumen, dan informasi elektronik yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain;
- 6) penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah;
- 7) Daerah;
- 8) penyelenggaraan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah;
- 9) pengoordinasian penyediaan ekosistem kota cerdas (smart city);
- 10) penyelenggaraan pengelolaan Pejabat Pengelola Teknologi dan Informasi/ Government Chief Information Officer (GCIO);
- 11) pengoordinasian monitoring dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 12) pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- 13) perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- 14) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

h. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi

Tugas

- 1) menyusun rencana kegiatan bidang persandian dan keamanan informasi;
- 2) menyusun bahan kebijakan bidang persandian dan keamanan informasi;

- 3) menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang persandian dan keamanan informasi;
- 4) melaksanakan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah;
- 5) melaksanakan keamanan informasi Pemerintahan Daerah berbasis elektronik dan non elektronik;
- 6) melaksanakan layanan keamanan informasi Pemerintah Daerah;
- 7) melaksanakan operasionalisasi jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah;
- 8) menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- 9) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan sampai dengan Desember 2024, tercatat sebanyak 30 orang. Keadaan pegawai berdasarkan pendidikan, posisi jabatan dan golongan adalah sebagai berikut:

a. Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Gambaran mengenai pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan berdasarkan tingkat pendidikan kondisi Agustus 2025 sebagaimana Tabel II-1.

Tabel II-1
Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan

NO	BIDANG	PENDIDIKAN (Orang)							GENDER		TOTAL (Orang)
		SD	SMP	SMA	D3	S-1	S-2	S-3	L	P	
1.	Sekretariat	0	0	6	2	8	1	0	10	7	17
2.	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1	0	3	2	7	2	0	9	6	14
3.	Bidang Infrastruktur dan Statistik	0	0	0	0	6	0	0	5	1	6
4.	Bidang Aplikasi dan Persandian	0	0	1	2	8	0	1	11	1	12

NO	BIDANG	PENDIDIKAN (Orang)							GENDER		TOTAL (Orang)
		SD	SMP	SMA	D3	S-1	S-2	S-3	L	P	
5.	Jabatan Fungsional Tertentu	0	0	0	4	13	0	0	14	3	17
Jumlah (Orang)		1	0	10	10	42	3	1	49	18	67

Sumber: Dinkominfo Kota Pekalongan per Agustus 2025

Berdasarkan Tabel II-1, diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan terendah adalah **SD (1,49%)**, **SMA (14,93%)**, **D3 (14,93%)**, **S-1 (62,69%)**, **S-2 (4,48%)**, serta **S-3 (1,49%)**.

b. Pegawai berdasarkan golongan

Berdasarkan golongan, komposisi pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan kondisi Juni 2025 terbanyak adalah pegawai Golongan III (70,3%). Secara lengkap komposisi pegawai Diskominfo berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel II.2.

Tabel II-2
Komposisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Pekalongan Berdasarkan Golongan

NO	BIDANG	GOLONGAN (Orang)						Total (Orang)
		I	II	III	IV	PPPK	non ASN	
1.	Sekretariat	0	1	3	2	0	11	16
2.	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	0	0	2	0	1	12	15
3.	Bidang Infrastruktur dan Statistik	0	0	3	0	0	3	6
4.	Bidang Aplikasi dan Persandian	0	0	4	1	0	7	13
5.	Jabatan Fungsional Tertentu	0	2	13	0	2	0	17
Jumlah (Orang)		0	3	25	3	3	33	67
Persentase (%)		-	4,48%	37,31%	4,48%	4,48%	49,25%	100%

Sumber: Dinkominfo Kota Pekalongan per Agustus 2025

Tabel II-3

Prasarana dan Sarana Dinkominfo Kota Pekalongan Tahun 2025

NO	SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
	Tanah	2	
1	TANAH	2	
	Peralatan dan Mesin	1.573	
1	ALAT BESAR	6	
2	ALAT ANGKUTAN	24	
3	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	5	
4	ALAT PERTANIAN	2	
5	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	2	
6	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCARAN	1.573	
7	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	6	
8	ALAT LABORATORIUM	24	
9	ALAT PERSENJATAAN	5	
10	KOMPUTER	1	
11	ALAT EKSPLORASI	509	
12	ALAT PENGEBORAN	326	
13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN	0	
14	ALAT BANTU EKSPLORASI	100	
15	ALAT KESELAMATAN KERJA	0	
16	ALAT PERAGA	602	
17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0	
18	RAMBU - RAMBU	0	
19	PERALATAN OLAH RAGA	0	
20	GEDUNG DAN BANGUNAN	0	
21	BANGUNAN GEDUNG	0	

NO	SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
22	MONUMEN	0	
23	BANGUNAN MENARA	0	
24	Tugu Titik Kontrol/Pasti	0	
	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	0	
1	JALAN DAN JEMBATAN	9	
2	BANGUNAN AIR	8	
3	INSTALASI	0	
4	JARINGAN	1	
	Aset Tetap Lainnya	67	
1	Bahan Perpustakaan	42	
2	Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan / Olahraga	25	
3	HEWAN	0	
4	BIOTA PERAIRAN	0	
5	TANAMAN	0	
6	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0	
7	Aset Tetap Dalam Renovasi	0	
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	

Sumber: Dinkominfo Kota Pekalongan per Juni 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran kinerja Dinkominfo Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 diperoleh dari Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk Tahun 2023, 2024 dan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinkominfo Kota Pekalongan Tahun 2024 serta evaluasi s.d. triwulan IV 2024 untuk gambaran kinerja Tahun 2025-2029. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II-4

Tabel II-4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra PD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
1	Nilai SAKIP OPD				Nilai	85,00	85,00	86,00	87,00	87,60	87,80	-	86,16	87,00	87,60	83,40	-	-	101,3	101,1	96	95.2	-
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																						
	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja				persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	100	-
	Presentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				persen	100	100	100	100	100	100	100	100	91.56	100	100	-	100	100	91.56	100	100	-
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah				persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	100	-
2	Kinerja Unit Pelayanan Informasi Publik				Mutu Pelayanan	Baik (nilai 76,61-88,30)	Baik (Nilai 76,61 - 88,30)	Baik (Nilai 76,61 - 88,30)	Baik (Nilai 76,61 - 88,30)	Sangat Baik (Nilai 88,31 - 100)	Sangat Baik (88,31 -100)	-	-	Sangat Baik (88,31-100)	Sangat Baik (88,31-100)	Sangat Baik (88,31-100)	-	-	-	100	100	100	-
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK																						

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra PD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik				persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	100	-
3	Indeks domain tata kelola SPBE				Indeks	3.05	2,75	2,85	2,95	3,3	3,4	-	2.10	2.40	3.20	3.30	-		76,3	73	108	100	-
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA																						
	Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi				Indeks	-	-	2,9	3,00	3.10	3.20	-	-	3.02	3.00	3.25	-	-	-	104	100	104,14	-
4	Persentase ketersediaan data statistik sektoral				Persen	66	66	68	70	98,50	98,50	-	97,12	90,22	98,22	97,87	-	-	-	132	140	99,3	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL																						
	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral				persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100	-	100	100	100	-
5	Indeks tata kelola KAMI				Indeks	I	I	I	I	II	II	I	I	I	II	III+		100	100	100	101	101	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI																						
	Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan				persen	-	-	1,87	2,8	2,8	2,8	-	-	1,87	2,8	2,8	-	-	-	100	100	100	-

Tabel ini menyajikan gambaran kinerja perangkat daerah dalam urusan pemerintahan yang diampu oleh dinas komunikasi dan informatika, termasuk komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian. Secara umum, target kinerja yang ditetapkan cukup tinggi, yaitu 100 untuk sebagian besar indikator.

Dalam program penunjang urusan pemerintahan daerah, capaian realisasi mendekati target, menunjukkan kinerja yang baik dalam administrasi dan pengelolaan barang milik daerah. Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik mencapai target dalam penyelesaian permohonan informasi publik. Indeks teknologi informasi dan komunikasi juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Di bidang statistik, perangkat daerah berhasil menyediakan data statistik sektoral sesuai target. Sementara itu, program persandian menunjukkan capaian yang baik dalam pengujian kerentanan sistem elektronik.

Berikut adalah beberapa poin yang perlu diperhatikan:

- Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah:
 - Pada beberapa tahun, realisasi capaian di bawah 100%, menunjukkan bahwa target penuh belum tercapai. Hal ini mengindikasikan adanya ruang untuk perbaikan dalam efisiensi dan efektivitas layanan administrasi.
- Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi:
 - Meskipun terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, terdapat perbedaan antara target dan realisasi, menunjukkan bahwa masih ada upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai target yang ditetapkan.
- Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan:
 - walau telah mencapai 100% pada rasio capaian, tetap ada perbedaan angka antara target dan realisasi, yang menunjukan bahwa ada naik turun, dan belum sepenuhnya stabil.

Tabel II-5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan

No	Indikator belanja keuangan perangkat daerah	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Pendapatan	250,000,000	330,000,000	350,000,000	420,000,000	450,000,000	251,759,243	280,527,245	318,942,870	355,352,386	481,341,565	101%	85%	91%	85%	107%	15,74%	17,40%
	Belanja Langsung																	
	Belanja Pegawai	3,172,442,000	3,413,466,000	3,128,082,000	3,423,343,000	3,984,379,000	2,593,952,214	2,528,841,551	2,981,533,498	3,294,412,380	3,776,133,452	82%	74%	95%	96%	95%	5,83%	9,71%
	Belanja Barang / Jasa	7,206,748,000	7,373,242,000	9,077,378,000	9,392,727,000	9,766,465,000	6,785,952,183	7,184,954,327	8,409,195,801	9,301,686,467	9,506,710,950	94%	97%	93%	99%	97%	7,88%	8,73%
	Belanja Modal	1,025,828,000	2,031,408,000	1,480,118,000	982,896,000	442,860,000	1,009,041,550	1,849,493,700	1,465,663,811	978,562,443	437,611,636	98%	91%	99%	100%	99%	-18,42%	-18,32%

berdasarkan tabel diatas dapat dilihat hasil analisis Rasio Realisasi Anggaran sebagai berikut :

Secara umum, rasio realisasi anggaran terhadap anggaran yang ditetapkan menunjukkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan.

- **Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar:**
 - Rasio berada di kisaran 92 - 98%, menunjukkan pengelolaan yang cukup baik.
 - Tahun 2020 memiliki rasio terendah (69,30%), mengindikasikan adanya tantangan dalam penyerapan anggaran pada tahun tersebut.
- **Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika:**
 - Rasio stabil di kisaran 92 - 98%, menunjukkan konsistensi dalam penyerapan anggaran.
- **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:**
 - Rasio meningkat dari tahun ke tahun, menunjukkan perbaikan dalam pengelolaan anggaran.
 - Tahun 2020 dan 2021 memiliki rasio di bawah 90%, mengindikasikan perlunya perbaikan pada periode tersebut.
- **Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik:**
 - Rasio sangat bervariasi, dengan tahun 2020 dan 2023 mencapai di atas 99%. Namun, tahun 2021 dan 2022 berada di kisaran 91 - 92%. Hal ini menandakan adanya fluktuasi dalam penyerapan anggaran.
- **Program Pengelolaan Aplikasi Informatika:**
 - Rasio stabil di kisaran 91 - 98%, menunjukkan pengelolaan yang cukup baik.
- **Urusan Pemerintahan Bidang Statistik:**
 - Rasio bervariasi, dengan tahun 2020 sangat rendah (62,15%). Tahun-tahun berikutnya menunjukkan perbaikan dengan rasio di atas 96%.
- **Urusan Pemerintahan Bidang Persandian:**
 - Rasio bervariasi, dengan tahun 2022 mencapai 111,66%, yang menandakan adanya pengeluaran yang melebihi anggaran.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pengelolaan Pendanaan

Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah antara lain:

- **Prosedur/Mekanisme:**
 - Prosedur yang rumit atau birokratis dapat memperlambat penyerapan anggaran.
 - Perubahan regulasi atau kebijakan keuangan juga dapat mempengaruhi proses penganggaran dan realisasi.
- **Jumlah dan Kualitas Personel (Sumber Daya Manusia):**
 - Kapasitas SDM yang kurang memadai dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan dapat menghambat kinerja.
 - Rotasi atau pergantian personel yang sering juga dapat mempengaruhi kontinuitas dan efektivitas pengelolaan keuangan.
- **Progres Pelaksanaan Program:**
 - Keterlambatan dalam pelaksanaan program atau proyek dapat menyebabkan penyerapan anggaran yang tidak optimal.
 - Faktor-faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, bencana alam, atau pandemi juga dapat memengaruhi progres pelaksanaan program.
- **Perencanaan Anggaran:**
 - Perencanaan anggaran yang kurang matang, seperti kurangnya data yang akurat, dan kurangnya antisipasi terhadap perubahan yang akan terjadi, dapat menyebabkan terjadinya perbedaan yang besar antara anggaran dan realisasi.
- **Faktor Eksternal:**
 - Kondisi ekonomi nasional dan daerah.
 - Perubahan kebijakan pemerintah pusat.
 - Bencana alam atau kondisi darurat lainnya.

Dengan memahami faktor-faktor ini, Perangkat Daerah dapat mengambil langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendanaan pelayanan.

2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Dinkominfo kurun waktu 5 tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Dinkominfo untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD.

1. Tantangan

- a. Peningkatan Indeks SPBE berdasarkan PermenpanRB Nomor 59 Tahun 2020,.

- b. Meningkatkan pelayanan intranet baik aplikasi , DRC maupun infrastruktur jaringan berbasis Fiber Optic;
- c. Sesuai Perwal Nomor 69 Tahun 2013 tentang Pedoman Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Kota Pekalongan Nomor 4c Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Melalui Media Komunikasi Elektronik dengan melayani semua permohonan harus diselesaikan secara cepat.
- d. Meningkatkan layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik secara bertahap (pencarian informasi, pengunggahan, pengunduhan dokumen, otomasi pertukaran data, basis data, validasi data, mekanisme persetujuan dan analitik data.
- e. Berdasarkan Peraturan BSSN (Badan Siber Sandi Negara) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam penyelenggaraan elektronik secara bertahap meningkatkan Indeks Kami menuju ISO 27001.

2. Peluang

- a. Peningkatan kebutuhan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, murah dan sederhana.
- b. Kebutuhan pengembangan TIK dalam mewujudkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Kota Pekalongan.
- c. Kebutuhan pengembangan muatan e-Government sesuai karakteristik daerah di Kota Pekalongan.
- d. Kesadaran masyarakat Kota Pekalongan akan pentingnya statistik sektoral, informasi dan komunikasi.
- e. Kebutuhan pengembangan TIK dalam mewujudkan Digitalisasi Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintahan Kota Pekalongan

2.1.5 Kelompok sasaran layanan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan merancang dan menyediakan layanan yang menysasar berbagai kelompok sasaran secara terarah dan berkesinambungan. Kelompok sasaran layanan ini merupakan bagian penting dari strategi pelayanan publik yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat serta dinamika teknologi informasi.

Kelompok sasaran utama layanan Diskominfo meliputi:

1. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan

Sebagai fasilitator dan pengelola sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), Diskominfo menyediakan dukungan teknis dan sistem informasi untuk seluruh perangkat daerah. Layanan ini mencakup pengelolaan jaringan intra pemerintah, penyediaan aplikasi administrasi pemerintahan, integrasi data sektoral, serta dukungan keamanan informasi dan persandian.

2. Masyarakat Umum

Masyarakat menjadi kelompok sasaran yang sangat penting dalam layanan informasi publik, literasi digital, serta akses internet publik. Diskominfo menyediakan layanan informasi melalui media digital, layanan aduan publik, serta penyediaan akses internet gratis di ruang publik guna mendorong kesetaraan akses terhadap teknologi dan informasi.

3. Pelaku Usaha dan Komunitas Digital

Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital lokal, Diskominfo memberikan perhatian kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta komunitas digital. Dukungan diberikan dalam bentuk promosi melalui kanal digital, pelatihan pemasaran digital, serta fasilitasi penggunaan platform teknologi untuk meningkatkan daya saing usaha.

4. Pelajar dan Kalangan Pendidikan

Sebagai bagian dari upaya peningkatan literasi digital, Diskominfo juga menyasar kalangan pelajar, mahasiswa, dan tenaga pendidik melalui program pelatihan, seminar, dan konten edukatif berbasis digital. Layanan ini bertujuan untuk membentuk generasi yang melek digital, produktif, dan aman dalam memanfaatkan teknologi informasi.

Dengan mengenali dan merumuskan layanan berdasarkan kelompok sasaran secara spesifik, Diskominfo Kota Pekalongan berkomitmen untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, berbasis teknologi, dan berkelanjutan. Strategi ini juga mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang inklusif, terbuka, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Permasalahan disajikan secara ringkas tanpa menyajikan data-data yang berlebih dan berpotensi menimbulkan duplikasi dengan data-data yang sudah disajikan di bab-bab sebelumnya.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Sumber daya Dinkominfo Kota Pekalongan yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Dinkominfo selama kurun waktu 2 tahun ke belakang (Tahun 2023-2024) serta tantangan dan peluang yang ada maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Dinkominfo. Pemetaan permasalahan pelayanan Dinkominfo Kota Pekalongan dapat dilihat pada Tabel II-6.

Tabel II-6
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya kematangan layanan jaringan intra pemerintah	Belum optimalnya pemerataan jaringan berkualitas untuk unit kerja	Belum tercapainya pembangunan jaringan kabel <i>fiber optic</i> untuk seluruh unit kerja
		Belum optimalnya akses uniterja terhadap jaringan intra pemerintah	Belum optimalnya kapasitas bandwidth yang sesuai dengan beban kebutuhan
			Kurangnya pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan intra pemerintah
2	Belum optimalnya ketersediaan data statistik sektoral	Belum optimalnya pengumpulan data statistik sektoral	Belum optimalnya kompetensi pengelola data sektoral pada perangkat daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			Kurangnya komitmen perangkat daerah dalam menyediakan data statistik sektoral
3	belum optimalnya layanan komunikasi publik	Belum optimalnya pemahaman perangkat daerah terkait keterbukaan informasi publik	Belum optimalnya komitmen perangkat daerah dalam mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik
		Belum optimalnya tema informasi yang dipublikasikan	Belum adanya pedoman strategi komunikasi publik
		Belum optimalnya kualitas transmisi siaran LPPL	Belum optimalnya sarana dan prasarana pemancar siaran pada LPPL
		Terbatasnya mitra media lokal dalam penyebaran informasi publik	Adanya media lokal yang belum memenuhi ketentuan dewan pers
		Belum optimalnya publikasi informasi publik	Belum optimalnya pengembangan kompetensi teknis bidang komunikasi publik
			Belum optimalnya sarana dan prasarana komunikasi publik
4	Belum optimalnya penyelenggaraan SPBE	Terbatasnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) SPBE	Terbatasnya kepemimpinan SPBE yang kolaboratif dan inovatif
			Terbatasnya kompetensi teknis SPBE yang dimiliki oleh ASN yang terlibat dalam penerapan SPBE
		perencanaan strategis belum sepenuhnya terintegrasi	rencana dan anggaran SPBE belum terkoordinasikan dengan unit pengelola TIK
			dokumen perencanaan strategis belum sepenuhnya menyeluruh,

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			terutama dalam hal keterpaduan rencana dan anggaran SPBE
		infrastruktur TIK belum diterapkan secara merata	kapasitas infrastruktur jaringan masih terbatas di beberapa daerah
		audit TIK belum dilakukan secara menyeluruh sesuai pedoman	kurangnya sumberdaya dan tenaga ahli yang fokus dalam audit sistem SPBE
			audit aplikasi SPBE belum mengikuti standar yang ditetapkan
			audit infrastruktur SPBE belum dilakukan secara terstruktur dan berkala
5	belum optimalnya layanan persandian dan implementasi keamanan informasi	Tingginya Risiko Kebocoran Data dan Serangan Siber	Infrastruktur keamanan informasi (firewall, enkripsi, sistem deteksi intrusi) yang usang dan tidak terintegrasi.
			Minimnya audit keamanan informasi berkala dan pemutakhiran sistem untuk mengidentifikasi kerentanan.
			Masih minimnya implementasi teknologi kriptografi modern untuk integritas data.
		Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten	Keterbatasan program pelatihan/sertifikasi teknis untuk meningkatkan kompetensi SDM.
		Infrastruktur Teknologi yang Belum Memadai	Terbatasnya anggaran untuk pengadaan dan upgrade perangkat keras serta perangkat lunak keamanan
			Tidak ada sistem pemantauan keamanan siber (cybersecurity)

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			monitoring) real-time.
		Belum Optimalnya Implementasi Regulasi dan Kebijakan Keamanan Informasi	Ruang lingkup regulasi internal masih terbatas. Belum menyeluruh tingkat kota
		Belum optimalnya peran serta Stakeholder	Minimnya sosialisasi dan edukasi tentang risiko serta pentingnya keamanan siber
			Minimnya perangkat daerah yang memanfaatkan layanan persandian
			Belum adanya forum lintas OPD untuk membahas keamanan informasi

2.2.2 Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Diskominfo adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam kinerja dan pelayanan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pada 5 (lima) tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi dan informatika Kota Pekalongan jangka menengah, maka dapat ditetapkan isu strategis Diskominfo Kota Pekalongan yaitu:

1. Belum optimalnya Fasilitas teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung pelayanan publik;
2. Belum optimalnya kebutuhan pengembangan TIK dalam mewujudkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan tata kelola keamanan informasi Pemerintah Kota Pekalongan ;

3. Belum optimalnya penyelenggaraan e-Government yang sesuai dengan karakteristik daerah di Kota Pekalongan dalam mendukung implementasi SPBE;
4. Belum optimalnya kesadaran masyarakat Kota Pekalongan akan pentingnya statistik sektoral, informasi dan komunikasi;

Tabel II-7
Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Infrastruktur dan layanan TIK pemerintahan	Pemanfaatan TIK untuk mendukung pelayanan publik belum optimal	Akses layanan publik yang inklusif dan efisien	Peningkatan kualitas layanan publik berbasis teknologi	Percepatan SPBE nasional	Keterbatasan kapasitas infrastruktur TIK daerah	Fasilitasi teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung pelayanan publik belum optimal
Infrastruktur dan SDM TIK	Kebutuhan TIK untuk mendukung tata kelola pemerintahan belum optimal	Tata kelola yang adaptif terhadap perkembangan TIK	Transformasi digital pemerintahan	Digitalisasi layanan publik dan interoperabilitas sistem	Kesiapan SDM dan sistem pendukung daerah	Belum optimalnya kebutuhan pengembangan TIK dalam mewujudkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Kota Pekalongan
Sistem informasi pemerintahan	Belum optimalnya e-Government yang sesuai dengan karakteristik lokal	Keadilan dan relevansi akses teknologi berbasis kebutuhan lokal	Lokalisasi teknologi dan layanan e-Gov	Implementasi e-Government adaptif	muatan lokal dalam e-Government belum optimal	Belum optimalnya muatan e-Government sesuai karakteristik daerah di Kota Pekalongan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kanal informasi publik dan statistik sektoral	literasi informasi, komunikasi, dan statistik sektoral belum optimal	Partisipasi publik dan keterbukaan informasi	Disinformasi global, belum optimalnya literasi data	Keterbukaan informasi publik	Belum tumbuhnya kesadaran literasi digital di masyarakat	Belum tumbuhnya kesadaran masyarakat Kota Pekalongan akan pentingnya statistik sektoral, informasi dan komunikasi
Keamanan informasi dan sistem	capaian sistem keamanan informasi daerah belum optimal	Keamanan dan privasi dalam layanan publik	Ancaman siber dan perlindungan data pribadi	Penguatan keamanan informasi dan manajemen risiko SPBE	Keterbatasan implementasi manajemen keamanan informasi	Belum optimalnya capaian TIK dalam mewujudkan Digitalisasi Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintahan Kota Pekalongan

Penentuan isu-isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan dilakukan melalui telaah terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi pelayanan perangkat daerah, baik secara internal maupun eksternal. Faktor-faktor tersebut direview secara sistematis untuk memahami akar permasalahan serta tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

a. gambaran pelayanan perangkat daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki peran strategis dalam mendukung keterbukaan informasi publik, pengelolaan data dan statistik sektoral, pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), penyelenggaraan infrastruktur TIK, serta layanan komunikasi publik. Tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan infrastruktur digital, disparitas literasi TIK, dan kebutuhan peningkatan keamanan informasi.

b. sasaran jangka menengah pada renstra Kementerian Komunikasi Digital

Sasaran jangka menengah dalam Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menjadi acuan penting bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan dalam merumuskan kebijakan dan arah pembangunan sektoral. Terdapat sejumlah sasaran strategis nasional yang berimplikasi langsung terhadap pelayanan Dinkominfo daerah, di antaranya:

1. **Percepatan Transformasi Digital Nasional**, melalui pengembangan infrastruktur TIK, penguatan layanan digital, dan peningkatan literasi digital masyarakat.
2. **Perluasan Akses dan Konektivitas TIK**, termasuk penyediaan layanan internet yang merata dan terjangkau di seluruh wilayah Indonesia.
3. **Penguatan Tata Kelola Data dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)** untuk mendukung efisiensi birokrasi dan pengambilan keputusan berbasis data.
4. **Keamanan Informasi dan Kedaulatan Data Digital**, dalam rangka perlindungan informasi publik serta stabilitas layanan komunikasi.

Berdasarkan keselarasan dengan sasaran tersebut, berikut adalah faktor-faktor pelayanan Dinkominfo Kota Pekalongan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan:

1. Kesenjangan Infrastruktur TIK

Meskipun layanan jaringan dan internet telah menjangkau sebagian besar wilayah perkotaan, masih terdapat wilayah tertentu di Kota Pekalongan yang belum sepenuhnya terlayani secara optimal. Hal ini menyebabkan disparitas akses informasi dan pelayanan digital di masyarakat.

2. Keterbatasan SDM dan Literasi Digital

Kualitas SDM di bidang TIK, baik di kalangan ASN maupun masyarakat umum, masih belum sepenuhnya mendukung agenda transformasi digital. Hal ini berdampak pada efektivitas implementasi SPBE, pelayanan berbasis aplikasi, serta pengelolaan data sektoral.

3. Belum Optimalnya Integrasi Layanan SPBE

Beberapa sistem informasi di perangkat daerah masih berjalan secara parsial dan belum terintegrasi secara menyeluruh, sehingga belum mampu mendukung efisiensi tata kelola pemerintahan yang berbasis data dan teknologi.

4. Keamanan Informasi yang Masih Perlu Diperkuat

Tingkat keamanan siber dan pengelolaan persandian masih menghadapi tantangan, terutama dalam konteks perlindungan data layanan publik dan mitigasi terhadap potensi serangan siber.

5. Keterbatasan Anggaran dan Investasi Teknologi

Keterbatasan anggaran daerah dalam pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur TIK menyebabkan beberapa inisiatif strategis belum bisa dilaksanakan secara maksimal, terutama terkait peningkatan kapasitas pusat data, Command Center, dan layanan digital masyarakat.

Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan pentingnya penyelarasan antara sasaran strategis nasional dengan konteks kebutuhan dan kapasitas daerah, agar program-program transformasi digital di Kota Pekalongan dapat berjalan lebih efektif dan merata.

c. sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Kominfo provinsi Jawa Tengah

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah menetapkan sejumlah sasaran jangka menengah yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang berbasis digital, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sasaran tersebut menjadi rujukan penting bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan dalam menyusun program dan kegiatan yang selaras dengan arah pembangunan provinsi.

Adapun sasaran strategis jangka menengah yang dimaksud antara lain:

1. Meningkatkan Ketersediaan dan Pemerataan Infrastruktur TIK di wilayah Jawa Tengah.
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi Publik dan Kehumasan Pemerintah Daerah.
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi dan Efisien.
4. Meningkatkan Literasi Digital dan Kapasitas SDM TIK di Lingkungan Pemerintah dan Masyarakat.
5. Meningkatkan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah secara Terstruktur dan Sistematis.

Dari sasaran tersebut, dapat diidentifikasi sejumlah faktor pelayanan Dinkominfo Kota Pekalongan yang turut mempengaruhi permasalahan pelayanan, yaitu:

1. Keterbatasan Pemerataan Infrastruktur TIK

Masih terdapat wilayah yang belum terlayani secara optimal oleh jaringan internet maupun layanan komunikasi, baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat. Hal ini menjadi kendala dalam menjangkau layanan digital secara merata, khususnya untuk mendukung pengembangan smart city dan SPBE.

2. Kurangnya Kapasitas Layanan Informasi Publik yang Inklusif

Pelayanan informasi publik, baik melalui media konvensional maupun digital, masih menghadapi tantangan dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Perluasan kanal komunikasi dan penguatan konten informasi yang mudah dipahami oleh publik menjadi kebutuhan mendesak.

3. Belum Maksimalnya Integrasi SPBE antar Perangkat Daerah

Kota Pekalongan masih menghadapi hambatan dalam hal interoperabilitas data dan sistem, sehingga efektivitas pelaksanaan SPBE lintas perangkat daerah belum sepenuhnya tercapai. Hal ini berpengaruh terhadap efisiensi pelayanan publik dan pengambilan kebijakan berbasis data.

4. Kesenjangan Kompetensi SDM di Bidang TIK

ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan masih memiliki tingkat kemampuan TIK yang beragam. Keterbatasan pelatihan dan pendampingan teknis menyebabkan rendahnya pemanfaatan sistem digital dalam pekerjaan sehari-hari.

5. Penguatan Keamanan Informasi yang Belum Komprehensif

Kebutuhan terhadap sistem pengamanan data yang memadai, termasuk penerapan standar pengelolaan keamanan informasi, masih menjadi pekerjaan rumah. Keamanan siber harus diperkuat seiring meningkatnya digitalisasi layanan publik.

Permasalahan-permasalahan ini menunjukkan perlunya Dinkominfo Kota Pekalongan untuk terus bersinergi dengan kebijakan provinsi, khususnya dalam hal pengembangan infrastruktur TIK, peningkatan kapasitas SDM, dan percepatan implementasi SPBE. Penyelarasan ini akan memastikan bahwa pelayanan komunikasi

dan informatika di Kota Pekalongan tidak tertinggal dalam arus transformasi digital yang digagas secara nasional maupun regional.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029

Rumusan Pernyataan Tujuan Jangka Menengah Dinkominfo Kota Pekalongan dirumuskan sebagai berikut : **Mewujudkan transparansi pelayanan publik berbasis digital dengan mengoptimalkan implementasi SPBE serta meningkatkan penyelenggaraan statistik sektoral.** Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan terpercaya melalui:

1. Optimalisasi Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE):
 - Menerapkan SPBE secara terintegrasi dan menyeluruh untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
 - Memastikan keberlanjutan dan pengembangan SPBE sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.
2. Mewujudkan Keamanan Informasi Daerah:
 - Membangun sistem keamanan informasi yang kuat untuk melindungi data dan informasi pemerintah daerah dari ancaman siber.
 - Meningkatkan kesadaran dan kapasitas aparatur pemerintah dalam bidang keamanan informasi.
3. Mewujudkan Transparansi Pelayanan Publik Berbasis Digital:
 - Mengembangkan dan menyediakan layanan publik berbasis digital yang mudah diakses, transparan, dan akuntabel.
 - Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik.
4. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral:
 - Meningkatkan kualitas dan ketersediaan data statistik sektoral yang akurat, relevan, dan tepat waktu.
 - Memanfaatkan data statistik sektoral untuk mendukung pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan.
5. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik:
 - Meningkatkan kualitas layanan publik di bidang komunikasi dan informatika melalui inovasi dan peningkatan kompetensi aparatur.

- Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang disediakan

Dengan rumusan ini, Dinkominfo Kota Pekalongan menegaskan fokusnya pada transformasi digital dan peningkatan kualitas layanan untuk masyarakat.

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029

1. Meningkatnya kematangan pengelolaan aplikasi dan infrastruktur SPBE
2. Meningkatnya kematangan penerapan manajemen keamanan informasi
3. Meningkatnya layanan informasi publik
4. Meningkatnya kualitas data statistik sektoral
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Tabel III-1
Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
terwujudnya sistem birokrasi yang efektif akuntabel inovatif dan pelayanan publik berbasis digital	Mewujudkan transparansi pelayanan publik berbasis digital dengan mengoptimalkan implementasi SPBE serta meningkatkan penyelenggaraan statistik sektoral	Meningkatnya kematangan pengelolaan aplikasi dan infrastruktur SPBE	Indeks SPBE (IUP)	3,76	3,87	3,87	4,07	4,07	4,22	Data rilis Kemenpan, jika pada tahun N tidak dilakukan evaluasi maka akan menggunakan data evaluasi tahun terakhir
		Meningkatnya kematangan penerapan manajemen keamanan informasi	Indeks keamanan informasi (KAMI)	n/a	715	730	745	760	775	1) Nilai maksimal 126 2) Mengevaluasi kesiapan bentuk tata kelola keamanan informasi beserta fungsi, tugas dan tanggungjawab pengelola keamanan informasi
		Meningkatnya layanan informasi publik	Nilai keterbukaan informasi publik	96,1	96,25	96,5	96,75	97	97,25	rata rata nilai keterbukaan informasi publik pada seluruh opd, jumlah OPD 29 (kominfo tidak dihitung karena sebagai opd penyelenggara)
		Meningkatnya kualitas data statistik sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,62	2,63	2,63	2,65	2,65	2,7	dihitung berdasarkan peraturan BPS nomor 3 tahun 2022

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Tabel III-2
Strategi Renstra PD

	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tema Pembangunan RPJMD	Transformasi sosial yang produktif, berkarakter dan berbudaya melalui penguatan kualitas dan manajemen SDM sebagai sumber daya pembangunan yang berkelanjutan	Transformasi tata kelola pemerintahan digital yang akuntabel, transparan, berintegritas, tangkas dan kolaboratif serta penguatan kondusivitas wilayah disertai dengan sistem peningkatan kesejahteraan dan keselamatan masyarakat	Transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular yang didukung dengan peningkatan lingkungan hidup serta tata kelola investasi	Penguatan Pembangunan Infrastruktur dasar permukiman dan perkotaan yang berkualitas	Optimalisasi pembangunan pondasi Mina Batik"
Strategi Tahunan RPJMD	Peningkatan SDM pendidikan untuk memenuhi kualifikasi dan kompetensi dalam mendukung akses dan mutu pendidikan yang smart, inklusif, berkarakter dan religius	Transformasi Digital Pendidikan, serta peningkatan peran dan kerjasama stakeholder pendidikan dalam penguatan pendidikan karakter dan keagamaan sejak dini	Penguatan implementasi muatan lokal pendidikan kewirausahaan, kebencanaan dan lingkungan hidup dalam pendidikan formal dan non formal	Peningkatan dan pemerataan sarana prasarana layanan pendidikan yang smart, inklusif, berkarakter dan religius	Pengembangan ekosistem pendidikan berkarakter dan penerapan kurikulum yang berorientasi Mina Batik di satuan pendidikan
Strategi Renstra OPD	Peningkatan SDM, Kepemimpinan, dan Literasi Digital	Penerapan Transformasi, Arsitektur, dan Kolaborasi Digital	Pengelolaan Layanan, Data, dan Kecerdasan Buatan	Pengelolaan Aplikasi, Keamanan, dan Infrastruktur Digital	Peningkatan Layanan, Integrasi, dan Kepuasan Pengguna

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Tabel III-3
Arah Kebijakan Renstra PD

NO	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penguatan kelembagaan, profesionalitas ASN, regulasi yang tepat fungsi, akuntabilitas kinerja dan keuangan, serta peningkatan pelayanan publik berbasis digital, dalam rangka perwujudan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan Kelembagaan Bidang Komunikasi dan Informatika; • Peningkatan Profesionalitas SDM Aparatur (ASN) Bidang TIK; • Penyusunan dan Penyesuaian Regulasi Bidang Kominfo yang Tepat Fungsi; • Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Berbasis Teknologi; • Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Keterbukaan Informasi; • Transformasi Digital Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel. 	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

1. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Fokus program adalah pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi publik sebesar 25 Persen.

b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Fokus program adalah pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah Kabupaten/Kota; pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu tingkat kematangan pembangunan aplikasi SPBE sebesar 5,00; tingkat kematangan layanan pusat data sebesar 5,00; tingkat kematangan layanan jaringan intra pemerintah daerah sebesar 5,00.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Fokus program adalah penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase ketersediaan data statistik sektoral sebesar 98 persen.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Fokus program adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota; penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu nilai kematangan penerapan manajemen keamanan informasi sebesar 5,00.

4. Non Urusan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Fokus program adalah perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah; administrasi keuangan perangkat daerah; administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah; administrasi kepegawaian perangkat daerah; administrasi umum perangkat daerah; penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah; pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;

Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah sebesar 100 persen; persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sebesar 100 persen; persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah sebesar 100 persen;

Berikut adalah rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Diskominfo Kota Pekalongan:

Tujuan :

Mewujudkan transparansi pelayanan publik berbasis digital dengan mengoptimalkan implementasi SPBE serta meningkatkan penyelenggaraan statistik sektoral.

Sasaran :

1. Meningkatnya kematangan pengelolaan aplikasi dan infrastruktur SPBE;
2. Meningkatnya kematangan penerapan manajemen keamanan informasi;
3. Meningkatnya layanan informasi publik;
4. Meningkatnya kualitas data statistik sektoral;
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Tabel IV-1

Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	Indikator	Satuan	Baseline		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										Ket
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah	Presentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah	persen	100	100	100	Rp5.840.5 80.000	100	Rp5.992.7 53.000	100	Rp6.078.2 67.000	100	Rp6.166.4 96.000	100	Rp6.255.5 07.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	persen	100	100	100	Rp16.257. 000	100	Rp19.257. 000	100	Rp19.957. 000	100	Rp21.057. 000	100	Rp21.457. 000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	2	2	Rp2.494.0 00	2	Rp2.694.0 00	2	Rp2.894.0 00	2	Rp3.194.0 00	2	Rp3.294.0 00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	2	2	2	Rp1.763.0 00	2	Rp2.063.0 00	2	Rp2.363.0 00	2	Rp2.963.0 00	2	Rp3.063.0 00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	15	15	15	Rp12.000. 000	15	Rp14.500. 000	15	Rp14.700. 000	15	Rp14.900. 000	15	Rp15.100. 000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	Indikator	Satuan	Baseline		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										Ket
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	persen	100	100	100	Rp4.345.605.000	100	Rp4.348.905.000	100	Rp4.348.905.000	100	Rp4.348.905.000	100	Rp4.348.905.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terlaksananya Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	30	34	34	Rp4.300.101.000	34	Rp4.300.101.000	34	Rp4.300.101.000	34	Rp4.300.101.000	34	Rp4.300.101.000	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	12	12	12	Rp43.870.000	12	Rp47.170.000	12	Rp47.170.000	12	Rp47.170.000	12	Rp47.170.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	1	1	Rp1.634.000	1	Rp1.634.000	1	Rp1.634.000	1	Rp1.634.000	1	Rp1.634.000	
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen													
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian	persen	100	100	100	Rp148.110.000	100	Rp148.610.000	100	Rp149.110.000	100	Rp149.610.000	100	Rp150.110.000	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	2	2	2	Rp10.000.000	2	Rp10.500.000	2	Rp11.000.000	2	Rp11.500.000	2	Rp12.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	Indikator	Satuan	Baseline		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										Ket
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	100	100	100	Rp138.11 0.000	100	Rp138.11 0.000	100	Rp138.11 0.000	100	Rp138.11 0.000	100	Rp138.11 0.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	persen	100	100	100	Rp346.57 0.000	100	Rp421.90 0.000	100	Rp444.80 0.000	100	Rp468.70 0.000	100	Rp492.70 0.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	4	4	4	Rp6.000.0 00	4	Rp6.300.0 00	4	Rp6.600.0 00	4	Rp6.900.0 00	4	Rp7.200.0 00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	4	4	4	Rp116.46 0.000	4	Rp120.00 0.000	4	Rp125.00 0.000	4	Rp130.00 0.000	4	Rp135.00 0.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	4	4	4	Rp10.000. 000	4	Rp11.000. 000	4	Rp12.000. 000	4	Rp13.000. 000	4	Rp14.000. 000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	4	4	4	Rp82.460. 000	4	Rp121.00 0.000	4	Rp125.00 0.000	4	Rp130.00 0.000	4	Rp135.00 0.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2	2	2	Rp29.200. 000	2	Rp30.600. 000	2	Rp32.200. 000	2	Rp33.800. 000	2	Rp35.500. 000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	2	2	2	Rp12.150. 000	2	Rp13.000. 000	2	Rp14.000. 000	2	Rp15.000. 000	2	Rp16.000. 000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ SUBPROGRAM OUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	Indikator	Satuan	Baseline		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										Ket
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	-	80	80	Rp90.300.000	80	Rp120.000.000	80	Rp130.000.000	80	Rp140.000.000	80	Rp150.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	100	100	Rp631.840.000	100	Rp664.081.000	100	Rp695.495.000	100	Rp728.224.000	100	Rp762.335.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	4	4	4	Rp2.700.000	4	Rp2.800.000	4	Rp2.900.000	4	Rp3.000.000	4	Rp3.100.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	12	Rp501.220.000	12	Rp526.281.000	12	Rp552.595.000	12	Rp580.224.000	12	Rp609.235.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	12	Rp127.920.000	12	Rp135.000.000	12	Rp140.000.000	12	Rp145.000.000	12	Rp150.000.000	
	terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pengadaan /pemeliharaan barang milik daerah	persen													
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	100	100	Rp352.198.000	100	Rp390.000.000	100	Rp420.000.000	100	Rp450.000.000	100	Rp480.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	Indikator	Satuan	Baseline		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										Ket
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	24	24	24	Rp209.98 4.000	24	Rp220.00 0.000	24	Rp230.00 0.000	24	Rp240.00 0.000	24	Rp250.00 0.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	3	3	3	Rp54.614. 000	3	Rp75.000. 000	3	Rp90.000. 000	3	Rp105.00 0.000	3	Rp120.00 0.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	unit	50	50	50	Rp87.600. 000	50	Rp95.000. 000	50	Rp100.00 0.000	50	Rp105.00 0.000	50	Rp110.00 0.000	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi publik	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi publik	Persen	-	20	21	Rp4.174.8 67.000	22	Rp4.131.7 33.400	23	Rp4.327.0 54.000	24	Rp4.522.3 75.000	25	Rp4.717.6 96.200	
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan Daerah	persen	100	100	100	Rp4.174.8 67.000	100	Rp4.131.7 33.000	100	Rp4.327.0 54.000	100	Rp4.522.3 75.000	100	Rp4.717.6 96.000	
Relasi Media	terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	laporan	-	12	12	Rp709.44 0.000	12	Rp240.00 0.000	12	Rp250.00 0.000	12	Rp260.00 0.000	12	Rp270.00 0.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	Indikator	Satuan	Baseline		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										Ket
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	terlaksananya Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif Mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	komunitas	-	2	2	Rp43.660.000	2	Rp45.843.000	2	Rp48.026.000	2	Rp50.209.000	2	Rp52.392.000	
Pelayanan Informasi Publik	terlaksananya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai \ peraturan perundangan	permohonan	-	30	30	Rp112.328.000	30	Rp159.579.000	30	Rp167.178.000	30	Rp174.777.000	30	Rp182.376.000	
Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	rekomendasi	-	12	12	Rp442.172.000	12	Rp455.395.000	12	Rp477.081.000	12	Rp498.766.000	12	Rp520.452.000	
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	media	-	2	2	Rp2.739.284.000	2	Rp3.094.946.000	2	Rp3.242.324.000	2	Rp3.389.703.000	2	Rp3.537.081.000	
Penyusunan Konten	terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten informasi Publik	konten	-	9500	9600	Rp127.983.000	9700	Rp135.970.000	9800	Rp142.445.000	9900	Rp148.920.000	10000	Rp155.395.000	
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya kematangan SPBE, layanan pusat data, dan jaringan intra pemerintah daerah	1.tingkat kematangan pembangunan aplikasi SPBE			4,00	4,00	2.306.178.000	4,00	2.761.697.000	4,00	2.893.186.000	4,00	3.024.896.000	5,00	3.156.853.000	
		2.Tingkat kematangan layanan pusat data			4,00	4,00		4,00		4,00		5,00				
		3.tingkat kematangan layanan jaringan intra pemerintahan daerah			3,00	4,00		4,00		4,00		5,00				

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	Indikator	Satuan	Baseline		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										Ket
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase unit kerja yang menggunakan domain yang disediakan Dinas Kominfo (opd = 30+ puskesmas=14+ kelurahan=27+ rsud=1)	persen	100	Rp20.000.000	100	Rp21.000.000	100	Rp22.000.000	100	Rp23.000.000	100	Rp24.000.000	100	Rp20.000.000	
Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	dokumen	3	3	Rp20.000.000	3 dokumen	Rp21.000.000	3 dokumen	Rp22.000.000	3 dokumen	Rp23.000.000	3 dokumen	Rp24.000.000	3 dokumen	
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Pengelolaan E-government di Lingkup pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	persen	9,35	9,35	24,36	Rp2.286.178.000	28,63	Rp2.740.697.000	32,91	Rp2.871.186.000	37,18	Rp3.001.896.000	41,45	Rp3.132.853.000	
Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	terlaksananya Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	aplikasi	1	2	1	Rp79.420.000	1	Rp90.741.000	1	Rp95.278.000	1	Rp100.041.000	1	Rp105.044.000	
Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	perangkat daerah	181	181	181	Rp1.092.100.000	181	Rp1.474.567.000	181	Rp1.544.785.000	181	Rp1.615.000.000	181	Rp1.685.220.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	Indikator	Satuan	Baseline		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										Ket
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	terlaksananya Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	dokumen	2	-	3	Rp94.280.000	3	Rp98.994.000	3	Rp103.708.000	3	Rp108.422.000	3	Rp113.136.000	
Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	dokumen	2	-	3	Rp107.850.000	3	Rp113.242.000	3	Rp118.635.000	3	Rp124.027.000	3	Rp129.420.000	
Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	layanan	3	5	5	Rp49.470.000	5	Rp51.943.000	5	Rp54.417.000	5	Rp56.890.000	5	Rp59.364.000	
Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	dokumen	-	-	1	Rp100.000.000	1	Rp110.000.000	1	Rp115.000.000	1	Rp120.000.000	1	Rp125.000.000	
Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	terlaksananya Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	aplikasi	3	3	3	Rp395.158.000	3	Rp414.915.000	3	Rp434.673.000	3	Rp454.431.000	3	Rp474.189.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	Indikator	Satuan	Baseline		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										Ket
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	laporan	8	10	10	Rp167.90 0.000	10	Rp176.29 5.000	10	Rp184.69 0.000	10	Rp193.08 5.000	10	Rp201.48 0.000	
Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	dokumen	2	-	1	Rp100.00 0.000	1	Rp105.00 0.000	1	Rp110.00 0.000	1	Rp115.00 0.000	1	Rp120.00 0.000	
Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	terlaksananya Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	dokumen	-	-	2	Rp100.00 0.000	2	Rp105.00 0.000	2	Rp110.00 0.000	2	Rp115.00 0.000	2	Rp120.00 0.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Terwujudnya akurasi data statistik sektoral	Presentasi ketersediaan data statistik sektoral	persen	98,48	95,00	95,5	Rp107.46 0.000	96,00	Rp114.00 0.000	96,50	Rp120.50 0.000	97,00	Rp132.50 0.000	98,00	Rp140.50 0.000	
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral	dokumen	1	1	1	Rp107.46 0.000	1	Rp114.00 0.000	1	Rp120.50 0.000	1	Rp132.50 0.000	1	Rp140.50 0.000	
pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional	terlaksananya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	persen	-	0,00	0,90	Rp107.46 0.000	0,91	Rp114.00 0.000	0,92	Rp120.50 0.000	0,93	Rp132.50 0.000	0,94	Rp140.50 0.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																
PROGRAM	Terwujudnya keamanan	Nilai kematangan	nilai	4,00	4,00	4	Rp179.77	4	Rp193.20	4	Rp202.20	4	Rp211.20	5	Rp221.20	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	Indikator	Satuan	Baseline		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										Ket
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	informasi	penerapan manajemen keamanan informasi					3.000		0.000		0.000		0.000		0.000	
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	presentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan	persen		8,41	11,18	Rp149.77 3.000	12,35	Rp163.20 0.000	13,53	Rp172.20 0.000	14,17	Rp181.20 0.000	15,88	Rp191.20 0.000	
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian.	laporan	2	2	2	Rp16.227. 000	2	Rp17.200. 000	2	Rp18.200. 000	2	Rp19.200. 000	2	Rp20.200. 000	
Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	dokumen	-	2	2	Rp50.000. 000	2	Rp53.000. 000	2	Rp56.000. 000	2	Rp59.000. 000	2	Rp62.000. 000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	Indikator	Satuan	Baseline		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										Ket
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	terlaksananya Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	laporan	4	4	4	Rp33.000. 000	4	Rp35.000. 000	4	Rp37.000. 000	4	Rp39.000. 000	4	Rp42.000. 000	
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	perangkat daerah	30	30	30	Rp50.546. 000	30	Rp58.000. 000	30	Rp61.000. 000	30	Rp64.000. 000	30	Rp67.000. 000	
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	terlaksananya Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelancaran pengiriman dan penerimaan naskah dinas melalui jaring komunikasi sandi	persen	100	100	100	Rp30.000. 000	100	Rp30.000. 000	100	Rp30.000. 000	100	Rp30.000. 000	100	Rp30.000. 000	
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	terlaksananya Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	jumlah operasionalisasi layanan keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah daerah	kegiatan	-	1	1	Rp30.000. 000	1	Rp30.000. 000	1	Rp30.000. 000	1	Rp30.000. 000	1	Rp30.000. 000	

4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel IV-2

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang akuntabel dan sesuai ketentuan peraturan perundangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Relasi Media	
			Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	
			Pelayanan Informasi Publik	
			Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	
			Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
			Penyusunan Konten	
3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya kematangan SPBE, layanan pusat data, dan jaringan intra pemerintah daerah	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	
			Koordinasi penyusunan proses bisnis	
			Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	
			Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	
			Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	
			Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
			Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
			Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	
			Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	
			Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Terwujudnya akurasi data statistik sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan kegiatan data statistik dalam sistem statistik nasional	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Terwujudnya Keamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	
			Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	
			Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

4.4 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Utama Pembangunan

Tabel IV-3

Indikator Utama Pembangunan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,76	3,76	3,87	3,87	4,07	4,07	4,22	

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Tabel IV-4
Indikator Kinerja Utama PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Indeks aspek teknologi informasi dan komunikasi	indeks	3,25	3,35	3,35	3,45	3,45	3,65	3,65	3,85	Data rilis Kemenpan, jika pada tahun N tidak dilakukan evaluasi maka akan menggunakan data evaluasi tahun terakhir
2	Indeks tata kelola KAMI	indeks	95	95	95,00	95,00	95,00	95,00	100	105	1) Nilai maksimal 126 2) Mengevaluasi kesiapan bentuk tata kelola keamanan informasi beserta fungsi, tugas dan tanggungjawab pengelola keamanan informasi
3	Kinerja unit pelayanan informasi publik	persen	82,84	8.290	82,90	83,00	83,25	83,50	83,75	84,00	rata rata nilai keterbukaan informasi publik pada seluruh opd, jumlah OPD 29 (kominfo tidak dihitung karena sebagai opd penyelenggara)
4	Indeks Domain Proses Bisnis Statistik	indeks	2,9	2,9	2,90	3,00	3,10	3,20	3,30	3,30	didapat dari hasil penilaian BPS pusat dengan nilai sebagai berikut <1,8 : kurang, 1,8 - <2,6 cukup, 2,6 - <3,5 baik, 3,5 - <4,2 sangat baik, 4,2 - 5,0 Memuaskan
5	Nilai Sakip OPD	Nilai	83,40	83,50	83,5	83,7	83,9	84,1	84,3	84,5	Nilai Evaluasi AKIP Oleh Inspektorat Kota Pekalongan

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel IV-5

Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	persen	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah Perangkat Daerah terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas Kominfo / Jumlah Perangkat Daerah x 100 %
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	persen	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi / Jumlah layanan publik x 100 %
3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persen	29,46	30,08	30,74	31,63	32,53	33,42	34,31	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya / Jumlah Penduduk x 100 %
4	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah / Jumlah Perangkat Daerah x 100%
5	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah / Jumlah Perangkat Daerah x 100%

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Tingkat keamanan informasi pemerintah	persen	71,04	74,86	75,96	76,50	77,60	78,69	79,78	Jumlah nilai per area keamanan informasi / Jumlah area penilaian x 100 %
7	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	persen	94	100	100	100	100	100	100	Realisasi Belanja Anggaran untuk Unit Pelayanan dapat diakses di website pemda / Anggaran Belanja untuk Unit Pelayanan dapat diakses di website pemda x 100%
8	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah dokumen yang dipublikasi di website pemda / Total jumlah dokumen yang telah dirinci x 100%

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan yang komprehensif, memuat arah kebijakan, strategi, dan program kerja yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang sangat pesat, serta kebutuhan masyarakat Kota Pekalongan akan layanan informasi dan komunikasi yang berkualitas.

Pencapaian visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan, yaitu "Terwujudnya Layanan Komunikasi dan Informatika yang Modern dan Inovatif untuk Mendukung Kota Pekalongan yang Lebih Maju dan Sejahtera," memerlukan komitmen dan kerja sama dari seluruh jajaran dinas, serta dukungan dari berbagai pihak terkait.

Kami menyadari bahwa Renstra ini bukanlah dokumen yang statis. Oleh karena itu, evaluasi dan monitoring secara berkala akan dilakukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kami berharap Renstra ini dapat menjadi pedoman yang efektif bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dengan semangat kebersamaan dan kerja keras, kami yakin dapat mewujudkan Kota Pekalongan yang lebih maju, modern, dan berdaya saing di bidang komunikasi dan informatika.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini.